BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek Penelitian menurut Husein Umar (2005:303) mengemukakan bahwa:

”Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu.”

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

3.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Berdasarkan surat keputusan Walikotamadya kepala Daerah Tingkat II Bandung No : 9922/72 Tanggal 12 Juni 1972, Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung membawahi 5 (lima) satuan kerja, yaitu :

1. Bagian Perpajakan dan Restribusi (BAPAR)
2. Bagian Iuran Rehabilitasi Daerah (IREDA)
3. Bagian Eksploitasi Parkir (BEP)

4. Bagian Perusahaan Pasar (BPP)
5. Bagian Tata Usaha Dalam (TUD)

Pada tahun 1980, dikeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 09/PD. 1980 tanggal 10 Juli 1980, dimana Struktur Organisasi Dipenda mengalami perubahan, semula membawahi 5 (lima) satuan unit kerja diubah menjadi 7 (Tujuh) satuan unit kerja, yaitu :

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pajak
3. Seksi Restribusi
4. Seksi IPEDA
5. Seksi Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan
6. UPTD Pasar
7. UPTD Parkir dan Terminal

Dalam kegiatan operasional satuan untit kerja tersebut diatas, khususnya dalam bidang pemungutan pajak atau restribusi, dipakai sisitem MAPENDA (Manual Administrasi Pendapatan Daerah). Dengan sistem MAPENDA, petugas melaksanakan kegiatan pemungutan pajak atau restribusi secara langsung kepada wajib pajak atau wajib restribusi “Door to door”.

Guna terdapat keseragaman struktur Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, dikeluarkan keputusan mentri dalam negri nomor : 23 tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II,

yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan dikeluarkannya PERDA NO. 11 Tahun 1989 tanggal 30 Oktober 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Dengan dikeluarkannya Keputusan Mendagri No.23 Tahun 1989, perlu disusun sistem dan prosedur perpajakan, restribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih mutakhir sebagai penyempurnaan dari sistem dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan keputusan Mendagri No. 102 Tahun 1990 tentang sistem dan prosedur perpajakan, restribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten atau kotamadya daerah tingkat II seluruh wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah).

Dengan diberlakukannya MAPATDA maka sistem pemungutan pajak atau restribusi daerah yang sebelumnya dilaksanakan secara “Door to door” menjadi “Selft Assessment”, yaitu wajib pajak atau restribusi menyetor langsung kewajiban pembayaran pajak atau restribusi ke Dinas Pendapatan Daerah.

3.1.2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah

Dalam suatu perusahaan atau lembaga pemerintah terdapat visi dan misi, pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung terdapat visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah ”Profesional dalam pengelolaan pajak daerah dan Retribusi Daerah. Prima dalam pelayanan menuju kota jasa yang bermartabat (Bersih, Makmur, Taat dan bersahabat)”
b. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah:

    1. Mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
    2. Mewujudkan kerja sama pemerintah daerah dengan masyarakat wajib pajak.
    3. Menciptakan aparat yang bersih dan masyarakat yang sadar membayar pajak.
    4. Menciptakan akuntabilitas publik.
    5. Mewujudkan kinerja ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel.
    6. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk penyelenggaraan pemerintah.
    7. Menciptakan sumber daya manusia yang mempunyai idealism dan professional
    8. Menciptakan administrasi, monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah yang dijadikan tolak ukur kemandirian dalam otonomi daerah.

9. Mewujudkan aparatur Dinas Pendapatan Daerah yang proporsional, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah.

Sedangkan MOTTO Dinas Pendapatan Daerah adalah "*Kuingin Engkau Tersenyum Puas"* adalah suatu nilai yang perlu ditanamkan pada setiap petugas Dinas Pendapatan Daerah yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada WP sehingga WP merasakan bahwa pajak bukan lagi merupakan suatu beban, tetapi karena tumbuhnya kesadaran masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung mempunyai peranan yang sangat penting demi mewujudkan visi dan misi tersebut dari sektor pendapatan daerah. Untuk itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung akan berupaya semaksimal mungkin untuk menggali pendapatan dengan tidak memberatkan masyarakat yaitu dengan cara insentifikasi artinya tidak menaikan tarif pajak/retribusi daerah dan tidak menambah jenis pungutan, kecuali ada ketentuan/aturan lain yang lebih tinggi atau disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

3.1.3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung berbentuk *line* staf, karena terlihat adanya kewenangan dan tanggung jawab yang berjalan dari kepala dinas sampai kebawah menurut suatu garis vertikal (komando). Susunan organisasi sangat diperlukan untuk pengelolaan suatu perusahaan dan lembaga agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

Di bawah ini merupakan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut:

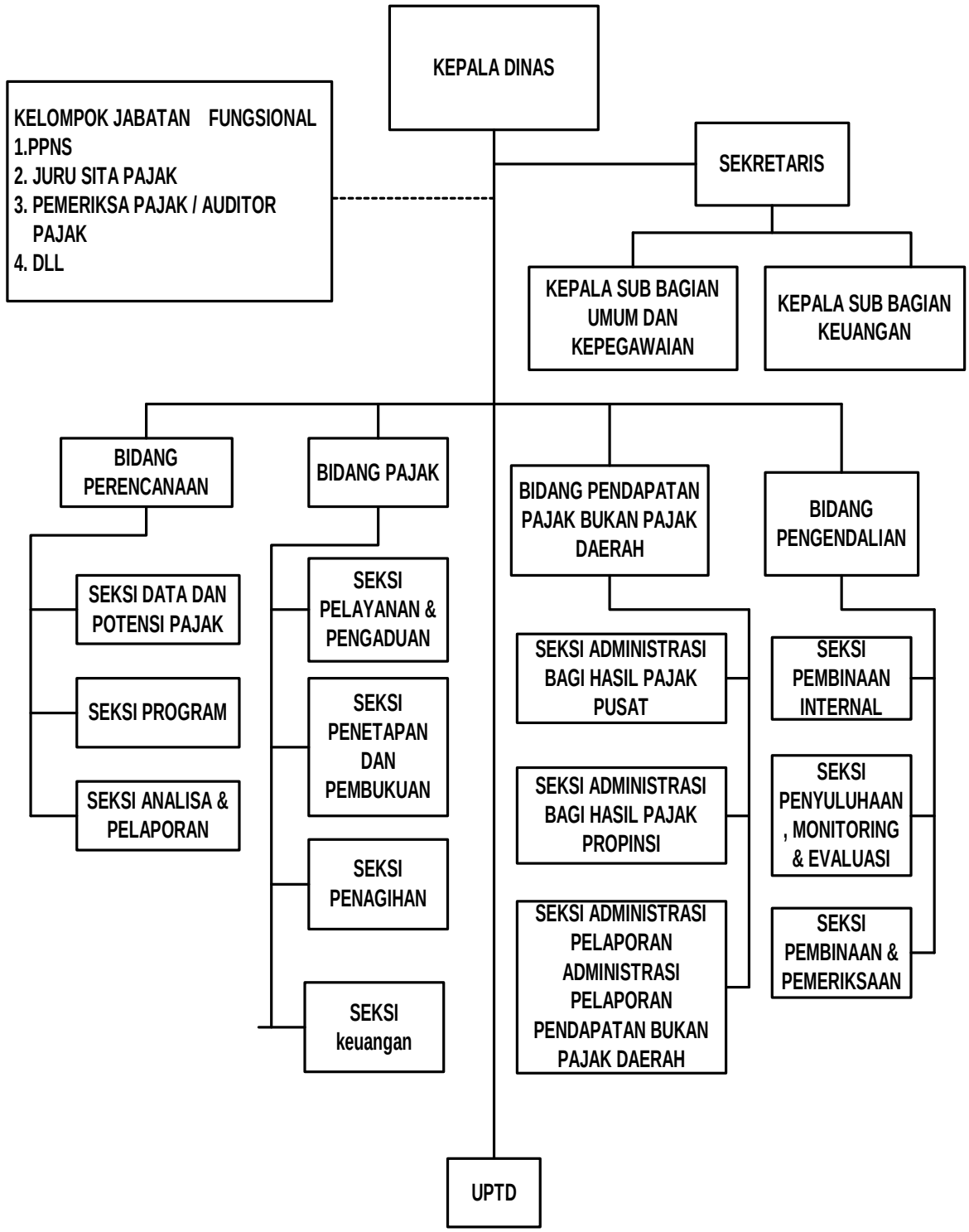
I. Kepala Dinas

II. Bagian Tata Usaha, membawahi:
    1. Sub Bagian Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
    3. Sub Bagian Keuangan.

III. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, membawahi:
    1. Seksi Perencanaan;
    2. Seksi Pengendalian;
    3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

IV. Bidang Pendapatan Asli Daerah, membawahi:
    1. Seksi Pendataan dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah;
    2. Seksi Penagihan Pendapatan Asli Daerah;
    3. Seksi Pembukuan Pendapatan Asli Daerah.

V. Bidang Pendapatan Lain-lain, membawahi:
    1. Seksi Pendataan dan Penetapan Pendapatan Lain-lain;
    2. Seksi Penagihan Pendapatan Lain-lain;
    3. Seksi Pembukuan Pendapatan Lain-lain.



Gambar 3.1
Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah

3.1.4. Deskripsi Tugas

Untuk menunjang program kegiatan maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung melaksanakan kegiatannya dimana akan diuraikan tugas dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

I. Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Kepala Dinas memiliki fungsi:

1. Melaksanakan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah yang meliputi perencanaan dan pengendalian operasional.
2. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Dinas.
3. Menyusun rencana strategis Dinas yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan.
4. Memberikan informasi mengenai pendapatan daerah, saran dan pertimbangan kepada Walikota sebagai bahan penentuan kebijakan atau pengambilan keputusan.
5. Mempertanggungjawabkan Dinas secara teknis operasional dan teknis administratif kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
6. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Instansi Pemerintahan maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
7. Mempersiapkan bahan untuk penetapan kebijaksanaan di bidang kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Mengandalkan pembinaan dan motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi para pegawai dilingkungan Dinas.

9. Membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

II. Bagian Tata Usaha

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum di lingkungan Dinas.
2. Menyusun rencana anggaran rutin.
3. Menyusun pedoman tata laksana administrasi umum.
4. Melaksanakan pengolahan dan bimbingan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Dinas.
5. Menyelenggarakan pembinaan kepegawaian, kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas serta pengembangannya.
6. Menyelenggarakan kegiatan rumah tangga Dinas.
7. Menyiapkan rancangan peraturan atau keputusan serta melaksanakan penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan atau keputusan yang berhubungan dengan tugasnya.
8. Memberikan telaahan staf kepada Kepala Dinas sebagai bahan penetapan kebijakan.
9. Menciptakan tertib administrasi dan tertib tata kerja organisaasi.
10. Mengumpulkan, pengolahan, pemeliharaan dan penyajian data serta pengurusan perpustakaan sesuai dengan petunjuk Kepala Dinas.
11. Menyusun laporan ketatausahaan dinas secara periodik.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bagian Tata Usaha dibantu oleh:

1. Sub Bagian Kepegawaian
2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
3. Sub Bagian Keuangan

1) Sub Bagian Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Mengumpulkan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan Dinas.
c. Menyususn Daftar Urut Kepegawaian (DUK) dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Daftar Penilaian Pelaksana Pekerjaan (DP-3) pegawai di lingkungan Dinas.
d. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana formasi usulan pengangkatan mutasi pegawai di lingkungan Dinas.
e. Menyusun rencana pengembangan pegawai di lingkungan Dinas.
f. Menyiapkan pengajuan/usulan dan pengiriman pegawai di lingkungan Dinas yang akan diikut sertakan dalam pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri.
g. Melakukan usaha-usaha dan kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas.
h. Menyiapkan bahan untuk pengajuan/usulan pegawai yang akan diberi tanda penghargaan di lingkungan Dinas.

i. Menyiapkan bahan-bahan pertimbangan pimpinan untuk perkawinan dan perceraian pegawai di lingkungan Dinas.
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan urusan ketatausahaan Dinas.
b. Menerima, pendistribusian dan mengirim surat-surat/naskah-naskah Dinas.
c. Menyelenggarakan, mengerjakan pengetikan dan pengadaan surat-surat/naskah-naskah Dinas.
d. Menyimpan, mengatur dan memelihara arsip Dinas.
e. Melaksanakan urusan rumah tangga, perjalanan tugas dan keprotokolan.
f. Menginventarisasi dan pemeliharaan kendaraan Dinas.
g. Menyelenggarakan adanya tertib administrasi, tertib administrasi ketatalaksanaan dan tertib hukum bagi satuan organisasi Dinas.
h. Menyiapkan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat Dinas.
i. Merencanakan keperluan alat-alat tulis kantor dan penyusunan petunjuk penggunaan/peruntukannya.
j. Memelihara ruangan dan pekarangan kantor.

k. Merencanakan dan melakukan analisa kebutuhan pelengkapan dan pembekalan untuk keperluan Dinas.
l. Melakukan langkah-langkah dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengadaan dan perlengkapan dan perbekalan untuk keperluan Dinas.
m. Menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan dan perbekalan serta benda berharga.
n. Menginventarisasi dan memelihara semua perlengkapan Dinas termasuk gedung-gedung.
o. Menyediakan dan merencanakan semua kebutuhan-kebutuhan kendaraan Dinas.
p. Mengurus administrasi perlengkapan.
q. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang-barang inventaris.
r. Mengendalikan barang-barang inventaris.
s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugasnya.

3) Sub bagian Keuangan

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tertera pada ayat (1) di atas, maka Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan urusan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar Isian Kegiatan (DIK).

c. Menyiapakan dan mengurus Surat Perintah Pembayaran (SPP).
d. Melaksanakan pembukuan keuangan belanja rutin secara sistematis sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku.
e. Menyusun daftar gaji dan tunjangan daerah serta pelaksanaan pembayaran.
f. Menerima, menyimpan dan membayar uang untuk keperluan Dinas.
g. Menyimpan dan mengurus bukti-bukti kas dan surat-surat berharga lainnya.
h. Menyusun posisi dan komposisi kas secara berkala.
i. Melakukan pembinaan dan bimbingan dalam hal administrasi keuangan di lingkungan Dinas.
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

III. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bagian Perencanaan dan Pengendalian Oerasional memiliki fungsi:

1. Merencanakan dan menghitung target pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan bagi hasil pendapatan daerah lain-lain.
2. Membina teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lain-lain serta pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).

3. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan pendapatan daerah yang meliputi pemantaun dan penendalian.
4. Melaksanakan analisa dan evaluasi pendapatan daerah serta membuat laporan pendapatan daerah.
5. Melakuakan kerja sama dengan instansi dan Dinas lainnya.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dibantu oleh:

1. Seksi Perencanaan

   Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Perencanaan

   Mempunyai fungsi:

   a. Menyusun target atau rencana pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pendapatan dan pendapatan lain-lain.
   b. Menyusun program kerja Dinas Pendapatan Daerah.
   c. Menyusun rancangan Peraturan Daerah dan keputusan Walikota tentang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
   d. Menyiapkan dan menyusun bahan kebijakan Dinas dan bahan rancangan peraturan perundang-undangan.
   e. Melaksanakan pembinaan tata kerja dan tata hubungan kerja.
   f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pengendalian

   Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Pengendalian mempunyai fungsi:

   a. Melaksanakan pemeriksaaan lapangan mengenai pendapatan daerah.
   b. Menyusun rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
   c. Menyusun rancangan Peraturan Daerah dan keputusan Walikota tentang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
   d. Membuat surat teguran dan surat-surat yang berhubungan dengan penegakan hukum atau pelaksanaan sanksi.
   e. Menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi pendapatan pajak daerah dan retribusi daaerah.
   f. Merumuskan penyelesaian permohonan banding atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah.
   g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

   Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

   a. Pengumpulan data dan pengolahan data sumber pendapatan daerah.
   b. Pengkajian realisasi pendapatan daerah.

c. Pelaksanaan evaluasi pendapatan daerah secara berkala bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
d. Penyususnan laporan pendapatan daerah secara periodik mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

IV. Bidang Pendapatan Asli Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Pendapatan Asli Daerah Mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan pendaftaran dan penadataan pajak dan retribusi daerah serta PAD lainnya yang sah.
2. Menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah serta PAD lainnya yang sah.
3. Menyusun daftar induk WP dan retribusi darah serta PAD lainnya yang sah.
4. Malaksanakan pemeriksaan atas objek pajak dan retribusi daerah.
5. Membuat surat teguran untuk menyampaikan kembali STPPD.
6. Menghitung pajak daerah dan retribusi daerah.
7. Menertibkan dan menyimpan surat ketetapan pajak dan retribusi daerah.
8. Melakukan kerja sama dengan instansi vertikal dan Dinas lainnya.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (2) pasal 11, Bidang Pendapatan Asli Daerah dibantu oleh:

1. Seksi Pendataan dan Penetapan PAD

   Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Pendataan dan Penetapan PAD memiliki fungsi:

   a. Mendaftar dan mendata wajib pajak dan wajib retribusi daerah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD).
   b. Melaksanakan pendistribusian SPTPD dan SPTRD.
   c. Menghimpun dan mengolah ata objek dan subjek wajib pajak/retribusi melalui formulir SPTPD dan SPTRD.
   d. Melaksanakan pemerikasaan lokasi atau lapangan wajib pajak dan retribusi daerah.
   e. Membuat surat teguran untuk menyampaikan kembali SPTPD dan SPTRD.
   f. Menyusun daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah.
   g. Menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran.
   h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
   i. Menghitung jumlah angsuran pemungutan / pembayaran / penyetoran atas permohonan wajib pajak daerah yang disetujui.

j. Menertibkan dan mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

k. Menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi darah yang berkaitan dengan penetapan.

l. Melayanai keberatan dan permohonan banding yang sesuai dengan batas kebenarannya.

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Penagihan PAD

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Penagihan PAD memiliki fungsi:

a. Menginventarisasi tunggakan-tunggakan dari semua jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam hal ini tunggakan atas wajib pajak/retribusi yang terhutang sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam SKP/SKR.

b. Membuat peringatan/teguran/surat paksa/surat cari yang sejenis terhadap para wajib pajak daerah/retribusi yang terutang.

c. Memantau terhadap para wajib pajak/retribusi yang telah menerima surat teguran, surat paksa dan surat lainnya.

d. Memberikan surat paksa terhadap para wajib pajak/retribusi yang tidak mengindahkan.

e. Memberikan surat perintah pelksanaan penyitaan bagi para wajib pajak/retribusi yang tidak mengindahkan terhadap surat sebelumnya.

f. Mengajukan penetapan tanggal permintaan pelelangan kepada kantor lelang Negara jika wajib pajak/retribusi masih belum melunasinya.

3. Seksi Pembukuan PAD

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Pembukuan PAD memiliki fungsi:

a. Mencatat penerimaan dan pemungutan/penyetoran pajak daerah/retribusi daerah.
b. Membukukan terhadap SKPD/SKRD dan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi daerah alinnya.
c. Mencatat mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan benda berharga kedalam kartu persediaan benda berharga.
d. Menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak daerah, menghitung realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan, dan tahunan.
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

V. Bidang Pendapatan Lain-lain

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi:

1. Menyusun dan mengumpulkan data potensi dan melaksanakan penagihan bagi hasil pendapatan yang brasal dari penerimaan pajak dan bukan pajak

di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Sumber Daya Alam, Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan pasal 21, serta bagi hasil lainnya termasuk bagian Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum.

2. Mengumpulkan data potensi dan melaksanakan penagihan pendapatan alin-lain.
3. Menghitung besarnya bagian yang akan diperoleh dari bagi hasil pendapatan.
4. Melaksanakan penagihan atas tunggakan pendapatan lain-lain.
5. Mencatat hasil pemantauan penyetoran ke Bank persepsi jenis penerimaan pajak dan bukan pajak yang menjadi bagian hak Pemerintah Daerah.
6. Membuat daftar realisasi pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak dan bukan pajak pendapatan lain-lain.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pendapatan Lain-lain di bantu oleh:

1. Seksi Pendataan dan Penetapan Pendapatan Lain-lain;

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Pendataan dan Penetapan Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi:

a. Mengumpulkan dan menyusun data potensial bagi hasil yang beasal dari PBB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan pasal 21, serta bagi hasil pajak lainnya dan pendapatan lain-lain.
b. Menyusun data potensi bagi hasil pendapatan yang berasal dari penerimaan pajak dan bukan pajak, Sumber Daya Alam dan bagi hasil lainnya termasuk DAU dan DAK dan potensi BUMD.
c. Membuat surat permintaan transfer yang berisi permintaan mentransfer bagian yang menjadi hak Pemerintah Daerah.
d. Mencatat dan mendata sumbangan pihak ke tiga.
e. Mencatat hasil pemantauan penyetoran bagi hasil pajak ke Bank pesepsi yang menjadi bagian hak Pemerintah Daerah.
f. Menghitung besarnya bagian yang akan diperoleh bagi hasil pajak dan bukan pajak.
g. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Penagihan Pendapatan Lain-lain

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Penagihan Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi:

a. Menginventarisir tunggakan-tunggakan objek pajak PBB maupun pajak-pajak lainnya seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, BPHTB, PPh OP Dalam Negeri, PPh pasal 21 da

BUMD, setelah data-data tunggakan tersebut diterima dari instansi terkait.

b. Membuat surat peringatan/teguran/surat paksa/surat lainnya yang sejenis terhadap objek pajak PBB, pajak-pajak lainnya yang terhitung dan bagi BUMD-BUMD yang belum menyetor kewajibannya yang telah menentukan.
c. Memantau terhadap objek pajak PBB, pajak-pajak lainnya serta BUMD-BUMD yang telah menerima Surat Peringatan, Surat Teguran, Surat Paksa, dan surat-surat lainnya.
d. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penagihan aktif (proses surat paksa, penyitaan sampai dengan lelang).
e. Memberikan surat perintah melaksanakan penyitaan bersama instansi terkait bagi objek pajak PBB/Pajak-pajak lainnya, yang tidak menginahkan terhadap surat sebelumnya.
f. Mengajukan penetapan tanggal penerimaan pelelangan kepada kantor lelang Negara jika objek pajak PBB atau pajak lainnya masih belum melunasinya.
g. Membuat surat permintaan transfer yang berisi permintaan mentransfer bagian yang menjadi bagian hak Pemerintah Daerah.
h. Mencatat hasil pemantauan penyetoran pajak lain-lain ke Bank Persepsi yang menjadi bagian hak Pemerintah Daerah.

i. Menghitung besarnya bagian yang akan diperoleh dari bagi hasil pajak dan pajak lain-lain.

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pembukuan Pendapatan Lain-lain.

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi PembukuanPendapatan Lain-lain mempunyai fungsi:

a. Mencatat mengenai penerimaan bagi hasil pendapatan yang terdiri dari PBB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, PPh OP Dalam Negeri dan PPH pasal 21, Bea DAU dan bagi hasil pendapatan lain-lain.

b. Melaporkan realisasi penerimaan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak, penerimaan BUMD dan penerimaan lain-lain secara bulanan, triwulan dan tahunan.

c. Mencatat mengenai penetapan dan penerimaan pendapatan lain-lain.

d. Mencatat mengenai penerimaan pendapatan lain-lain.

e. Menghitung besarnya bagian yang akan diperoleh dari bagi hasil pajak dan Pendapatan Daerah.

f. Mencatat penerimaan lain-lain ke dalam kartu kendali berdasarkan buku pembantu penerimaan sejenis dari BKP DIPENDA.

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Sugiyono (2009:3) Metode Penelitian adalah :

> "Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu".

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode penulisan studi kasus dan metode deskriptif dan verifikatif, menurut Sugiyono(2005 : 21) mendefinisikan bahwa :

> ''Metode Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas''.

Metode deskriptif ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang lebih mendalam antara dua variabel dengan cara mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang ada dengan tujuan penelitian, dimana data tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari sehingga data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Sedangkan metode verifikatif menurut Mashuri (2008:45) menyatakan bahwa :

> "Penelitian verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah

dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan .”

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel x terhadap y yang diteliti. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

3.2.1. Desain Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu dilakukan perencanaan dan perancangan penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis.

Desain penelitian menurut **Moh. Nazir (2003:84)** memaparkan bahwa:

“Desain Penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”.

Dari definisi di atas maka dapat dikatakan bahwa desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada waktu tertentu. Desain penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan judul yang akan diteliti, sehingga dapat diketahui apa yang akan diteliti dan yang menjadi masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini

penulis mengambil judul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah, dimana Sistem Informasi Akuntansi (variabel X) sebagai variabel bebas dan Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah (variabel Y) sebagai variabel terikat.

2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Proses penemuan masalah merupakan tahap penelitian yang paling sulit karena tujuan penelitian ini adalah menjawab masalah penelitian sehingga suatu penelitian tidak dapat dilakukan dengan baik jika masalahnya tidak dirumuskan secara jelas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Bagaimana Penerapan Sistem informasi Akuntansi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
b. Bagaimana akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
c. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

3. Memilih serta memberi pengukuran variabel. Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran dengan skala ordinal karena data yang diukurnya berupa tingkatan.
4. Memilih prosedur dan teknik yang digunakan.

5. Menyusun alat serta teknik pengumpulan data-data.
6. Pelaporan hasil penelitian termasuk proses penelitian dan interpretasikan data.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan desain dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Desain Penelitian

Tujuan Penelitian	**Desain Penelitian**			
	Jenis Penelitian	**Metode yang digunakan**	**Unit Analisis**	**Time Horizon**
T - 1	*Descriptive*	*Descriptive dan Survey*	Staf Bagian Keuangan dan Pajak	*Cross Sectional*
T - 2	*Descriptive*	*Descriptive dan Survey*	Staf Bagian Keuangan dan Pajak	*Cross Sectional*
T - 3	*Descriptive* dan *Verificative*	*Descriptive dan Survey*	Staf Bagian Keuangan dan Pajak	*Cross Sectional*

3.2.2. Operasionalisasi Variabel

Sebelum mengadakan penilaian dalam penelitian, penulis harus menentukan operasional variabel, hal ini dimaksudkan agar dapat mempermudah dalam melakukan penelitian. Menurut Sugiyono (2009:60) menerangkan bahwa:

> "Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya."

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi

terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah maka variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah:

1. *Variable Independent* (X) atau variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya dan merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya *Variable Dependent* (terikat). Data yang menjadi variabel bebas (Variabel X) adalah Penerapan Sistem informasi Akuntansi.
2. *Variable Dependent* atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Data yang menjadi variabel terikat (Variabel Y) adalah Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah.

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini tentang pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah akan dijelaskan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Ukuran	Skala Pengukuran
Sistem Informasi Akuntansi (Variabel X)	” sebuah sitem informasi yang mengubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya.” **(kusrini dan Andri 2007:11)**	1. Pengumpulan, pemasukan data dan pengolahan data transaksi	-tingkat Akurat -Laporan yang benar - ketepatan	Ordinal Ordinal
		2. Penyimpanan data transaksi	- Keamanan - kecepatan	Ordinal
		3. Pemberian informasi	-kemudahan - kebenaran	Ordinal
		4. Pengawasan	-Laporan -Kejujuran	Ordinal
Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah (Variabel Y)	Kewajiban untuk memberikan tanggung jawab dalam menyajikan/melaporkan informasi realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah kepada yang berwenang. **(Abdul Halim 2004:52)**	1. Akuntabilitas Kejujuran	Penghindaran penyalahgunaan jabatan	Ordinal
		2. Akuntabilitas Proses	Pelaksanaan pekerjaan	Ordinal
		3. Akuntabilitas Program	Tujuan tercapai	Ordinal
		4. Akuntabilitas Kebijakan	- Penerimaan pajak - peraturan	Ordinal

Jenis skala pengukuran yang digunakan yaitu ordinal, dimana oleh **Zainal Mustafa (2009:55)** dikemukakan bahwa:

”Skala Ordinal merupakan suatu instrument yang menghasilkan nilai atau skor yang bertingkat atau berjenjang (bergradasi)”.

Dalam operasionalisasi variabel ini semua variabel diukur oleh instrumen pengukur dalam bentuk kuesioner yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe skala likert. Skala likert menurut Sugiyono (2009:134) adalah sebagai berikut:

”Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”.

Untuk pilihan jawaban diberi skor, maka responden harus menggambarkan, mendukung pernyataan (item positif) atau tidak mendukung pernyataan (item negatif). Skor atas pilihan jawaban untuk kuesioner yang diajukan untuk pernyataan positif adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Skor pernyataan positif

No.	Keterangan	Skor
1.	Sangat Setuju	5
2.	Setuju	4
3.	Kurang setuju	3
4.	Tidak Setuju	2
5.	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono, 2009

3.2.3. Metode Penarikan Sample

Untuk mengetahui jumlah populasi dan sampel yang terdapat di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yaitu menggunakan metode penarikan sampel, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Populasi

Menurut Sudjana (1992:161) menyatakan bahwa pengertian populasi adalah sebagai berikut :

> "Totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung maupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitat If, daripada karaktristik tertentu mengenai sekumpulan obyek yang legkap dan jelas".
> Dari pengertian diatas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi merupakan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Populasi yang digunakan adalah staf bagian keuangan 10 orang dan staf bagian pajak daerah 17 orang pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yang semua jumlah populasinya berjumlah 27 orang.

2. Sampel

Menurut **Sugiyono (2009:118)** menjelaskan pengertian mengenai sampel, yaitu sebagai berikut :

> "Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut."

Kesimpulan dari pengertian sampel yaitu sebagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan memungkinkan peneliti tidak dapat mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Karena dengan menggunakan sampel dari populasi tersebut sudah dapat mewakili data yang ada pada populasi, dan membantu penulis dalam melakukan perhitungan.

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *non probability sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang sama untuk dipilih menjadi sampel. Jumlah populasi yang pada penelitian ini relatif kecil, karena semua anggota populasi dijadikan sampel, maka metode yang digunakan dalam penarikan sampel adalah sampling sensus.

Menurut Sudjana (2009:124) menjelaskan mengenai pengertian sensus, yaitu sebagai berikut :

> "Sensus adalah apabila setiap anggota atau karakter yang ada di dalam populasi dikenai penelitian".

Dari penjelasan diatas, dengan kata lain anggota populasi dianggap homogen. Jumlah populasi sebanyak 27 orang, karena penelitian ini menggunakan sensus maka jumlah sampel yang penulis tentukan yaitu 27 orang.

3.2.4. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer (data yang diperoleh langsung dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung) dan data sekunder.

Data primer ini didapatkan melalui teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan Langsung)

   yaitu dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dilokasi untuk memperoleh data yang diperlukan. Penulis melakukan pengamatan pada bagian keuangan dan pajak daerah Dinas Pendapatan Daerah. Hasil dari

observasi dapat dijadikan data pendukung dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan.

b. Wawancara atau *Interview*

yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penulis mengadakan hubungan langsung dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam teknik wawancara ini, penulis mengadakan tanya jawab kepada sumber yang dapat memberikan data atau informasi. Informasi itu berupa yang berkaitan dengan Sistem informasi akuntansi terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah.

c. Kuesioner

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut nantinya akan dihitung secara statistik Kuesioner tersebut berisi daftar pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden yang berhubungan dalam penelitian ini. Hasil dari kuesioner ini yaitu berupa data-data mengenai Sistem informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah.

Sebelum kuesioner digunakan untuk pengumpulan data yang sebenarnya, terlebih dahulu dilakukan uji coba kepada responden yang memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik populasi penelitian. Uji coba dilakukan untuk mengetahui tingkat kesahihan (Validitas) dan kekonsistenan

(reliabilitas) alat ukur penelitian, sehingga diperoleh *item-item* pertanyaan-pertanyaan yang layak untuk digunakan sebagai alat ukur untuk pengumpulan data penelitian.

Data sekunder ini didapatkan melalui teknik-teknik sebagai berikut:

d. Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada perusahaan. Mulai dari literatur, buku-buku yang ada. Adapun dokumen-dokumen yang menggambar sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, dokumen yang menerangkan struktur organisasi dan deskripsi kerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

3.2.5. Teknik Pengujian Data

Mengingat pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, maka kesunggunhan responden dalam menjawab setiap pertanyaan – pertanyaan yang diajukan oleh peneliti merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Keabsahan atau kesahihan suatu hasil penelitian sangat ditentukan oleh alat ukur yang digunakan. Apabila alat ukur yang digunakan tidak valid atau tidak dapat dipercaya, maka hasil penelitian yang dilakukan tidak akan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

Dalam mengatasi hal tersebut, maka diperlukan dua macam pengujian yaitu uji validitas dan uji realibitas. Jika validitas dan realibilitas tidak diketahui, maka akibatnya menjadi fatal dalam memberikan kesimpulan ataupun memberi alasan terhadap hubungan-hubungan antar variabel, bahkan secara luas validitas

dan realibilitas mencakup mutu seluruh proses pengambilan data sejak konsep disiapkan sampai data siap untuk dianalisis. Pengujian validitas merupakan pengujian yang digunakan untuk menunjukan sejauh mana suatu alat ukur itu dapat mengukur apa yang ingin diukur. Sedangkan pengujian reliabilitas merupakan pengujian yang menyangkut pada ketepatan alat ukur itu sendiri.

3.2.5.1 Uji Validitas

Menurut *Cooper* (2006:720) validitas adalah:

"Validity is a characteristic of measuraenment concerned with the extent that a test measures what the researcher actually wishes to measure".

Berdasarkan definisi diatas, maka validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur. Suatu alat ukur disebut *valid* bila ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur.

Tabel 3.4
Standar Penilaian Untuk Validitas

	Validity
Good	0,50
Acceptable	0,30
Marginal	0,20
Poor	0,10

(Sumber: Barker et al, 2002:70)

Seperti telah dijelaskan pada metodologi penelitian bahwa untuk menguji valid tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui nilai koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor total ≥ 0,30 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid dan apabila < 0,30 berarti data tersebut dapat dikatakan tidak valid menurut sugiyono (2009:178).

Secara teknis valid tidaknya suatu butir pernyataan dinilai berdasarkan kedekatan jawaban responden pada pernyataan tersebut dengan jawaban responden pada pernyataan lainnya. Nilai kedekatan jawaban responden diukur menggunakan koefisien korelasi, yaitu melalui nilai korelasi setiap butir pernyataan dengan total butir pernyataan lainnya. Butir pernyataan dinyatakan valid jika memiliki nilai koefisien korelasi lebih besar atau sama dengan 0,30. Berdasarkan hasil pengolahan data yang terkumpul, diperoleh nilai indeks validitas masing-masing butir pernyataan sebagai berikut.

3.2.5.2. Uji Reliabilitas

Menurut *Cooper* (2006:716) reliabilitas adalah:

"Reliability is a characteristic of measurenment concerned with acuracy, precision, and consistency".

Berdasarkan definisi diatas, maka reliabilitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik terkait dengan keakuratan, ketelitian dan kekonsistenan. Suatu alat ukur disebut reliabel pabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subyek memang belum berubah. Dalam hal ini relatif sama

berarti tetap adanya toleransi terhadap perbedaan-perbedaan kecil diantara hasil beberapa kali pengukuran.

Pengujian reliabilitas kuesioner penelitian menggunakan rumus *Alpha-Cronbach*, yaitu melalui variasi skor butir pernyataan dengan variasi total skor keseluruhan butir pernyataan yaitu dengan skor total ≥ 0,70. Untuk mengevaluasi ukuran validitas dan reliabilitas kuesioner digunakan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.5
Standar Penilaian Untuk Reliabilitas

	Reliability
Good	0,80
Acceptable	0,70

dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subyek memang belum berubah.

3.2.6. Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik inferensial. Statistik dapat diartikan sebagai alat untuk menganalisis dan alat untuk pengambilan keputusan.

Menurut **Sugiyono (2009:207)** dijelaskan mengenai statistik inferensial sebagai berikut:

“Statisktik inferensial (sering juga disebut statistik induktif atau statisktik probabilitas) adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi”.

Berdasarkan penjelasan di atas, data yang didapat dari penelitian di analisis dan hasil analisis tersebut diberlakukan untuk populasi.

3.2.6.1. Analisis Deskriptif atau Kualitatif

Dalam pelaksanaan, penelitian ini menggunakan jenis atau alat bentuk penelitian deskriptif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data dilapangan.

Penelitian Deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah.

Metode kualitatif yaitu metode pengolahan data yang menjelaskan pengaruh dan hubungan yang dinyatakan dengan kalimat. Analisis kualitatif digunakan untuk melihat faktor penyebab. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

a. Setiap indikator yang dinilai oleh responden, diklasifikasikan dalam lima alternatif jawaban dengan menggunakan skala ordinal yang menggambarkan peringkat jawaban.

b. Dihitung total skor setiap variabel / subvariabel = jumlah skor dari seluruh indikator variabel untuk semua responden.
c. Dihitung skor setiap variabel/subvariabel = rata-rata dari total skor.
d. Untuk mendeskripsikan jawaban responden, juga digunakan statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi dan tampilan dalam bentuk tabel ataupun grafik.
e. Untuk menjawab deskripsi tentang masing-masing variabel penelitian ini, digunakan rentang kriteria penilaian sebagai berikut:

Untuk menetapkan peringkat dalam setiap variabel penelitian, dapat dilihat dari perbandingan antara skor aktual dan skor ideal. Skor aktual diperoleh melalui hasil

perhitungan seluruh pendapat responden, sedangakan skor ideal diperoleh dari prediksi nilai tertinggi dikalikan dengan jumlah pertanyaan kuesioner dikalikan dengan jumlah responden. Apabila digambarkan dengan rumus, maka akan tampak seperti di bawah ini:

$$\text{Skor total} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ x } 100\%$$

(Sumber: Umi Narimawati, 2007:85)

Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi.

Penjelasan bobot nilai skor aktual dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Kriteria Presentase Tanggapan Responden

No.	% Jumlah Skor	Kriteria
1	**20.00% – 36.00%**	Tidak Baik
2	**36.01% – 52.00%**	Kurang Baik
3	**52.01% – 68.00%**	Cukup
4	**68.01% – 84.00%**	Baik
5	**84.01% – 100%**	Sangat Baik

(Sumber: Umi Narimawati, 2007:85)

3.2.6.2. Analisis Verifikatif atau Kuantitatif

Penelitian verifikatif adalah penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel dependent (X) yaitu sistem informasi akuntansi dan variabel independent (Y) akuntabilitas pendapatan pajak daerah. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

Metode kuantitatif adalah metode pengolahan data berbentuk angka. Metode kuantitatif dalam penelitian ini adalah:

a. Analisis Korelasi *Pearson*

Analisis koefisen korelasi *Pearson* digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya hubungan *linier* antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) serta mempunyai tujuan untuk meyakinkan bahwa pada kenyataannya terdapat hubungan antara Sistem Informasi Akuntansi dengan Akuntabilitas

Pendapatan Pajak Daerah, korelasi Pearson digunakan sebab data adalah ordinal yang harus dintervalkan :

$$r = \frac{n\left(\sum XY\right) - \left(\sum X\right)\left(\sum Y\right)}{\sqrt{\left\{n\left(\sum X^2\right) - \left(\sum X\right)^2\right\}\left\{n\left(\sum Y^2\right) - \left(\sum Y\right)^2\right\}}}$$

(Sumber: Sugiyono, 2007:274)

Keterangan :

r = Koefisien korelasi

X = Sistem informasi Akuntansi

Y = Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah

n = Banyaknya sampel

Koefisien korelasi mempunyai nilai $-1 \leq r \leq +1$ dimana :

1. Apabila r = +1, maka korelasi antara kedua variabel dikatakan sangat kuat dan searah, artinya jika X naik sebesar 1 maka Y juga akan naik sebesar 1 atau sebaliknya.
2. Apabila r = 0, maka hubungan antara kedua variabel sangat lebar atau tidak ada hubungan sama sekali.
3. Apabila r = -1, maka korelasi antara kedua variabel sangat kuat dan berlawanan arah, artinya apabila X naik sebesar 1 maka Y akan turun sebesar 1 atau sebaliknya.

Untuk memberikan interpretasi koefisien korelasinya maka penulis menggunakan pedoman sebagai berikut :

Tabel 3.7
Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,25	Korelasi sangat lemah (tidak ada)
>0,25 – 0,5	Korelasi cukup
>0,5 – 0,75	Korelasi kuat
>0,75 – 1	Korelasi sangat kuat

(Sumber : Jonathan Sarwono, 2005**)**

b. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Dampak dari analisis regresi dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik dan menurunnya variabel *dependent* (Akuntabilitas Pendaptan Pajak Daerah) dapat dilakukan melalui menaikkan dan menurunkan keadaan variabel *independent* (Sistem informasi Akuntansi). Atau dengan meningkatkan keadaan variabel *dependent* (Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah) dapat dilakukan dengan meningkatkan variabel *independent* (Sistem informasi Akuntansi). Dengan formulasi sebagai berikut :

$$\mathbf{Y = a + bX}$$

(Sumber: Jonathan, 2005:73)

Dimana nilai a dan b dicari terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

Dimana nilai a dan b dicari terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$a = \frac{\left(\sum Y\right)\left(\sum X^2\right) - \left(\sum X\right)\left(\sum XY\right)}{n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2}$$

(Sumber: Jonathan, 2005:73)

$$b = \frac{n\sum XY - \left(\sum X\right)\left(\sum Y\right)}{n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2}$$

(Sumber: Jonathan, 2005:73)

Keterangan:

a = konstanta (Y=0)

b = koefesien regresi

X = nilai variabel independen

Y = nilai variabel dependen

c. Koefisien Determinasi

Besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y dapat diketahui dengan menggunakan analisis koefisien determinasi atau disingkat Kd, yang diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasinya. Sehingga koefisien ini berguna untuk mengetahui besarnya kontribusi pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap pendapatan pajak daerah, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Kd = r^2_{yx} \times 100\%$$

(Sumber: Jonathan, 2005:72)

Keterangan :

Kd = Nilai koefisien determinasi

r_{yx} = Koefisien *korelasi Pearson*

3.2.6.3 Pengujian Hipotesis

Rancangan pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui korelasi dari kedua variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah korelasi antara sistem informasi akuntansi dan akuntabilitas pendapatan pajak daerah dengan menggunakan pengujian statistik. Langkah-langkah pengujian hipotesis ini dimulai dengan menetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, pemilihan test statistik dan perhitungan nilai statistik, penetapan tingkat signifikan, penetapan kriteria pengujian dan penarikan kesimpulan.

Langkah-langkah dalam uji hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Hipotesis
   a. Hipotesis Penelitian

      Ho : Sistem informasi akuntansi tidak memiliki pengaruh dengan akuntabilitas pendapatan pajak daerah.

      H1 : Sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh dengan akuntabilitas pendapatan pajak daerah

   b. Hipotesis Statistik

      Berdasarkan pada alat statistik yang digunakan dan hipotesis penelitian di atas maka penulis menetapkan dua hipotesis yang digunakan untuk uji statistiknya yaitu hipotesis nol (H_0) yang diformulasikan untuk

ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) yaitu hipotesis penulis yang diformulasikan untuk diterima, dengan perumusan sebagai berikut:

Ho : $\rho = 0$, Sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah.

H1 : $\rho \neq 0$, Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah.

2. Uji Statistik

Uji T digunakan untuk membandingkan rata-rata dua populasi dengan data yang berskala interval. Uji t digunakan dalam uji statistik penelitian ini sebab populasi < 30 menurut **Sugiyono (2008:184)**. Untuk menguji signifikansi suatu koefisien *Korelasi,* maka dapat menggunakan statistik uji t *student* dengan rumus sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

(Sumber: Sugiyono, 2008:184)

Keterangan :

t : nilai uji t

r : koefisien *Korelasi*

n : jumlah sampel

3. Menentukan tingkat signifikansi

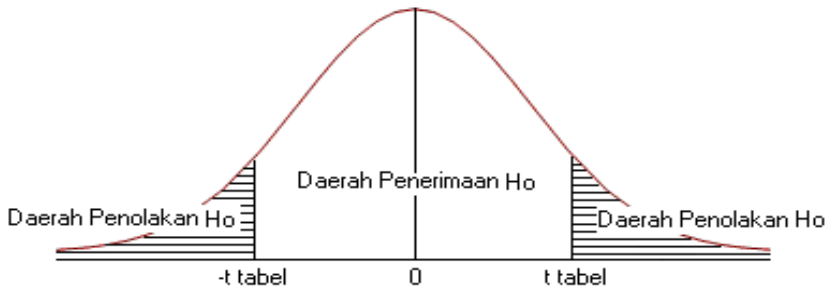
Agar hasil perhitungan koefisien korelasi dapat diketahui signifikan/tidak signifikan maka hasil perhitungan dari statistik uji t (t_{hitung}) tersebut selanjutnya dibandingkan dengan t_{tabel}. Tingkat signifikannya yaitu α = 0,01 dengan uji dua pihak dan derajat kebebasannya (dk = n-1), artinya jika hipotesis nol ditolak dengan taraf kepercayaan 99 %, maka kemungkinan bahwa hasil dari penarikan kesimpulan mempunyai kebenaran 99 % dan hal ini menunjukan adanya hubungan (korelasi) yang meyakinkan (signifikan) antara dua variabel tersebut.

4. Kriteria Penarikan Pengujian

Jika menggunakan tingkat kekeliruan (α = 0,01) untuk diuji dua pihak, maka kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis yaitu sebagai berikut:

a. Jika $t_{hitung} \geq t_{table}$ maka H_0 ada di daerah penolakan, berarti Ha diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada hubungannya.

b. Jika $t_{hitung} \leq t_{table}$ maka H_0 ada di daerah penerimaan, berarti Ha ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada hubungannya.



Gambar 3.2 Uji Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipótesis
Sumber Sugiyono (2009:185)

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data dan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan berdasarkan pada hasil kriteria yang telah dijelaskan di atas, juga dari teori-teori yang mendukung objek dari masalah yang diteliti.